



**BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 565);
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2021 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 11);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.
7. Perangkat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat PD adalah Unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Penyelenggaraan Unsur Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pendapatan Daerah adalah Pendapatan yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
10. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
11. Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp 1.517.100.155.093,00 (satu triliun lima ratus tujuh belas milyar seratus juta seratus lima puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, direncanakan Rp 203.438.653.130,00 (dua ratus tiga milyar empat ratus tiga puluh delapan juta enam ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga puluh rupiah) yang terdiri atas :
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;
 - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 100.730.082.990,00 (seratus milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah)
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan Rp 14.558.602.523,00 (empat belas milyar lima ratus lima puluh delapan juta enam ratus dua ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah)
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 13.257.475.000,00 (tiga belas milyar dua ratus lima puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 74.892.492.617,00 (tujuh puluh empat milyar delapan ratus sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh belas rupiah)

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, direncanakan sebesar Rp 100.730.082.990,00 (seratus milyar tujuh ratus tiga puluh juta delapan puluh dua ribu sembilan ratus sembilan puluh rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak kendaraan bermotor;
 - b. pajak hotel;
 - c. pajak restoran;
 - d. pajak hiburan;
 - e. pajak reklame;
 - f. pajak penerangan jalan;
 - g. pajak parkir;
 - h. pajak air tanah;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah)
- (3) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- (4) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 4.000.000.000,00 (empat milyar rupiah)
- (5) Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- (6) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)
- (7) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 25.264.307.385,00 (dua puluh lima milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus tujuh ribu tiga ratus delapan puluh lima rupiah)
- (8) Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 429.600.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah)
- (9) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

- (10) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 52.336.475.591,00 (lima puluh dua milyar tiga ratus tiga puluh enam juta empat ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)
- (11) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 9.453.585.422,00 (sembilan milyar empat ratus lima puluh tiga juta lima ratus delapan puluh lima ribu empat ratus dua puluh dua rupiah)
- (12) Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.656.114.592,00 (delapan milyar enam ratus lima puluh enam juta seratus empat belas ribu lima ratus sembilan puluh dua rupiah)

Pasal 6

- (1) Anggaran Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - Mobil Penumpang-sedan;

Pasal 7

- (1) Anggaran pajak hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
 - a. pajak pagelaran kesenian/musik/tari/ busana;
 - b. pajak diskotik, karaoke, klub malam, dan sejenisnya
 - c. dan pajak pertandingan olahraga.
- (2) Anggaran pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas :
 - a. pajak reklame papan/billboard/videotron/ megatron;
 - b. pajak reklame kain;dan
 - c. pajak reklame melekat/stiker.
- (3) Anggaran pajak penerangan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, terdiri atas:
 - a. pajak penerangan jalan dihasilkan sendiri;dan
 - b. pajak penerangan jalan sumber lain.
- (4) Anggaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, terdiri atas:
 - a. pajak batu kapur;
 - b. pajak marmer;
 - c. pajak pasir dan kerikil;
 - d. pajak pasir kuarsa;
 - e. pajak tanah liat;
 - f. pajak pasir kuarsa; dan
 - g. pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya.
- (5) Anggaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf j, terdiri atas;
 - a. BPHTB-Pemindahan Hak;dan
 - b. BPHTB-Pemberian Hak Baru.

Pasal 8

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan Rp 1.514.100.155.093,00 (satu triliun lima ratus empat belas milyar seratus juta seratus lima puluh lima ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:

- a. belanja operasional
- b. belanja modal
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer

Pasal 9

- (1) Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp 1.145.367.211.773,00 (satu triliun seratus empat puluh lima milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus tujuh puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai

- b. belanja barang dan jasa
 - c. belanja bunga
 - d. belanja subsidi
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 674.158.220.316,00 (enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah)
 - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 406.932.898.756,00 (empat ratus enam milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah)
 - (4) Belanja Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah)
 - (5) Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)
 - (6) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 61.809.995.501,00 (enam puluh satu milyar delapan ratus sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus satu rupiah)
 - (7) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 2.146.097.200,00 (dua milyar seratus empat puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 674.158.220.316,00 (enam ratus tujuh puluh empat milyar seratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. belanja tambahan penghasilan berdasarkan Pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.
 - g. Belanja Pegawai BOS
 - h. Belanja Pegawai BLUD
- (2) Gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 464.412.053.612,00 (empat ratus enam puluh empat milyar empat ratus dua belas juta lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah)
- (3) Belanja tambahan Penghasilan berdasarkan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 53.512.065.611,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta enam puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah)
- (4) Belanja tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 133.832.170.316,00 (seratus tiga puluh tiga milyar delapan ratus tiga puluh dua juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus enam belas rupiah)
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 18.333.185.819,00 (delapan belas milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus delapan puluh lima ribu delapan ratus sembilan belas rupiah)
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 1.040.979.691,00 (satu milyar empat puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah)
- (7) Belanja penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp 2.047.600.267,00 (dua milyar empat puluh tujuh juta enam ratus ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah)

- (8) Belanja Pegawai BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)

Pasal 11

- (1) Anggaran gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 464.412.053.612,00 (empat ratus enam puluh empat milyar empat ratus dua belas juta lima puluh tiga ribu enam ratus dua belas rupiah) yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN
 - e. belanja tunjangan fungsional Umum ASN
 - f. belanja tunjangan beras ASN
 - g. belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN
 - h. belanja pembulatan gaji ASN
 - i. belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN
 - j. belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN
 - k. belanja Iuran Jaminan Kematian ASN
- (2) Belanja gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp 345.925.137.204,00 (tiga ratus empat puluh lima milyar sembilan ratus dua puluh lima juta seratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah)
- (3) Belanja tunjangan keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp 31.812.962.367,00 (tiga puluh satu milyar delapan ratus dua belas juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)
- (4) Belanja tunjangan jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp 7.159.670.302,00 (tujuh milyar seratus lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus dua rupiah)
- (5) Belanja tunjangan fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp 33.092.453.289,00 (tiga puluh tiga milyar sembilan puluh dua juta empat ratus lima puluh tiga ribu dua ratus delapan puluh sembilan rupiah)
- (6) Belanja tunjangan fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp 2.494.851.395,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus lima puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)
- (7) Belanja tunjangan beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 19.531.563.295,00 (sembilan belas milyar lima ratus tiga puluh satu juta lima ratus enam puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah)
- (8) Belanja tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp 1.173.650.140,00 (satu milyar seratus tujuh puluh tiga juta enam ratus lima puluh ribu seratus empat puluh rupiah)
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp 5.916.510,00 (lima juta sembilan ratus enam belas ribu lima ratus sepuluh rupiah)
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp 20.394.125.646,00 (dua puluh milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta seratus dua puluh lima ribu enam ratus empat puluh enam rupiah)
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp 705.430.891,00 (tujuh ratus lima juta empat ratus tiga puluh ribu delapan ratus sembilan puluh satu rupiah)
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp 2.116.292.573,00 (dua milyar seratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah)

Pasal 12

Anggaran belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp 53.512.065.611,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus dua belas juta enam puluh lima ribu enam ratus sebelas rupiah)

Pasal 13

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar -Rp 3.000.000.000,00 (minus tiga milyar rupiah) yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
- b. Pengeluaran pembiayaan.

Pasal 14

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
 - a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. Pencairan dana cadangan;
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan pinjaman daerah;
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah;
 - f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)
- (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)
- (5) Penerimaan Pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)
- (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud ayat (!) huruf e direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)
- (7) Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)

Pasal 15

- (1) Anggaran sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)
 - a. Pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud ayat (1) direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)

Pasal 16

- (1) Anggaran pelampauan penerimaan PAD sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) huruf direncanakan sebesar 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)

Pasal 17

- (1) Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
 - a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;

- d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)
 - (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)
 - (4) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah)
 - (5) pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)
 - (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)

Pasal 18

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Pembentukan dana cadangan;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)

Pasal 19

- (1) Anggaran pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar 0 (nol rupiah) yang terdiri atas:
 - Penerusan pinjaman;
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (!) huruf a direncanakan sebesar 0 (nol rupiah)

Pasal 20

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus/(defisit) sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar -Rp 3.000.000.000,00 (minus tiga milyar rupiah)

Pasal 21

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan ini terdiri :

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 2. Lampiran II | Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| 3. Lampiran III | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; |
| 4. Lampiran IV | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial; |
| 5. Lampiran V | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus |
| 6. Lampiran VI | Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Belanja bagi hasil; |

7. Lampiran VII

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII

Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi, menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;

9. Lampiran IX

Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

10. Lampiran X

Sinkronisasi Kebijakan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada daerah perbatasan dalam Rancangan perda tentang APBD dan Rancangan perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara

Pasal 22

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan ini.

Pasal 23

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 24

Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pangkajene
pada tanggal 29 Desember 2023
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU

Diundangkan di Pangkajene
pada tanggal 29 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN TAHUN 2023 NOMOR 45



KABUPATEN PANGKAJENE KEPULAUAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	203.438.653.130,00
4.1.01	Pajak Daerah	100.730.082.990,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	30.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	30.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	30.000.000,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	4.000.000.000,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.000.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	4.000.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	20.000.000,00
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	6.555.000,00
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	6.555.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	7.700.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	7.700.000,00
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	5.745.000,00
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	5.745.000,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	400.000.000,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	124.815.000,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	124.815.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	274.985.000,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	274.985.000,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	200.000,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	200.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	25.264.307.385,00
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	19.496.793.385,00
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	19.496.793.385,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.767.514.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	5.767.514.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	429.600.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	429.600.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	429.600.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	140.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	140.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	140.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	52.336.475.591,00
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	43.444.409.000,00
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	43.444.409.000,00
4.1.01.14.19	Pajak Marmer	412.079.000,00
4.1.01.14.19.0001	Pajak Marmer	412.079.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	104.895.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	104.895.000,00
4.1.01.14.24	Pajak Pasir Kuarsa	383.984.000,00
4.1.01.14.24.0001	Pajak Pasir Kuarsa	383.984.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	7.206.010.591,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	7.206.010.591,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.098.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.098.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	9.453.585.422,00
4.1.01.15.01	PBBP2	9.453.585.422,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	9.453.585.422,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.656.114.592,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	8.656.114.592,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.656.114.592,00
4.1.02	Retribusi Daerah	14.558.602.523,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	8.210.805.702,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.541.594.000,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.541.594.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	596.250.000,00
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	596.250.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	950.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	950.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	1.996.961.702,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	1.257.948.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	383.827.000,00
4.1.02.01.05.0003	Retribusi Kios	355.186.702,00
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	120.000.000,00
4.1.02.01.06.0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	120.000.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	6.000.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	6.000.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	4.512.053.821,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.667.888.821,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	533.585.600,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1.784.303.221,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	350.000.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	20.000.000,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	20.000.000,00
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	153.750.000,00
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	153.750.000,00
4.1.02.02.04	Retribusi Terminal	5.000.000,00
4.1.02.02.04.0001	Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	5.000.000,00
4.1.02.02.06	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	250.800.000,00
4.1.02.02.06.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	250.800.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	150.000.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	150.000.000,00
4.1.02.02.08	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	146.515.000,00
4.1.02.02.08.0001	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	146.515.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	638.100.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	638.100.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	480.000.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	480.000.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.835.743.000,00
4.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.000.000,00
4.1.02.03.03.0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.831.743.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.831.743.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.257.475.000,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	13.257.475.000,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.257.475.000,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	13.257.475.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	74.892.492.617,00
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.311.900.000,00
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.311.900.000,00
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.311.900.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	2.798.755.104,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.798.755.104,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	2.798.755.104,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	1.187.177.513,00
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.187.177.513,00
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.187.177.513,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.049.660.000,00
4.1.04.08.01	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.049.660.000,00
4.1.04.08.01.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara	1.049.660.000,00
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.000.000,00
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.000.000,00
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	30.000.000,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	15.000.000,00
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	15.000.000,00
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	15.000.000,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	67.500.000.000,00
4.1.04.16.02	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	67.500.000.000,00
4.1.04.16.02.0001	Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan	67.500.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.285.272.126.963,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.205.285.129.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.140.786.371.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	21.979.024.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1.224.524.000,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	9.020.838.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	256.881.000,00
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	385.555.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	2.238.455.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	31.007.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	8.821.764.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	769.416.938.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	575.467.536.000,00
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	7.600.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	9.489.708.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	100.459.798.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	63.355.018.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	13.044.878.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	127.570.584.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	1.103.193.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	23.102.550.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.542.480.000,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	880.326.000,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	10.500.000.000,00
4.2.01.01.03.0030	DAK Fisik-Bidang Industri Kecil dan Menengah-Penugasan-Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	0,00
4.2.01.01.03.0031	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00
4.2.01.01.03.0032	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pariwisata-Penugasan	0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	21.400.595.000,00
4.2.01.01.03.0043	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00
4.2.01.01.03.0045	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00
4.2.01.01.03.0055	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	2.082.495.000,00
4.2.01.01.03.0057	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penurunan AKI dan AKB	3.794.113.000,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	62.164.832.000,00
4.2.01.01.03.0062	DAK Fisik-Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah-Penugasan	0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	221.819.825.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	49.255.800.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.725.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	105.746.021.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.255.100.000,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-TKG PNSD	11.122.937.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	5.960.400.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.704.400.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	32.505.686.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	366.131.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	0,00
4.2.01.01.04.0018	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisata	0,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00
4.2.01.01.04.0021	DAK Non Fisik-BOKB-KB	9.205.590.000,00
4.2.01.01.04.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00
4.2.01.01.04.0024	DAK Non Fisik-Dana Penguatan Kapasitas Kelembagaan Sentra IKM	1.972.760.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	64.498.758.000,00
4.2.01.05.01	Dana Desa	64.498.758.000,00
4.2.01.05.01.0001	Dana Desa	64.498.758.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	79.986.997.963,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	68.078.530.963,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	68.078.530.963,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	17.871.480.999,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	9.952.412.042,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	18.928.806.710,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	116.535.249,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.209.295.963,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	11.908.467.000,00
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	11.908.467.000,00
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	11.908.467.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	28.389.375.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00
4.3.01.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00
4.3.01.01.01.0001	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	28.389.375.000,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	28.389.375.000,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	28.389.375.000,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	28.389.375.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.517.100.155.093,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.145.367.211.773,00
5.1.01	Belanja Pegawai	674.158.220.316,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	464.412.053.612,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	345.925.137.204,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	300.052.807.604,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	45.872.329.600,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	31.812.962.367,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	27.462.838.071,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	4.350.124.296,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	7.159.670.302,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	7.159.670.302,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	0,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	33.092.453.289,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	27.993.143.289,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	5.099.310.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.494.851.395,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.472.031.395,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	22.820.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	19.531.563.295,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	16.258.136.695,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	3.273.426.600,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.173.650.140,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.173.650.140,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	5.916.510,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	4.404.772,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	1.511.738,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	20.394.125.646,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	17.555.815.990,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	2.838.309.656,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	705.430.891,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	595.337.300,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	110.093.591,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.116.292.573,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.786.011.800,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	330.280.773,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	53.512.065.611,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	41.946.482.194,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	41.946.482.194,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	9.145.783.417,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	9.145.783.417,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	2.419.800.000,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	2.419.800.000,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	133.832.170.316,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	3.116.753.724,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	926.760,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	123.568.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	617.840,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	12.356.800,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	780.464.984,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	13.271.203,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	4.324.880,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.616.778.404,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	292.040.161,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	272.404.692,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	701.497.937,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	227.079.700,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	30.112.500,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	47.500.000,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	6.000.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	324.038.737,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	12.000.000,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	250.000,00
5.1.01.03.02.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	3.750.000,00
5.1.01.03.02.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	6.296.250,00
5.1.01.03.02.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pelayanan Kepelabuhan	7.325.750,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	36.945.000,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	200.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	105.746.021.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	105.746.021.000,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	11.122.937.000,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	11.122.937.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.255.100.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.255.100.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.941.879.000,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.941.879.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.869.981.655,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	8.091.491.655,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	778.490.000,00
5.1.01.03.08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	78.000.000,00
5.1.01.03.08.0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	78.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	18.333.185.819,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	72.000.600,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	72.000.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	104.429.831,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	104.429.831,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	58.646.700,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	58.646.700,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	101.946.600,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	101.946.600,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	128.621.688,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	128.621.688,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	4.193.150.400,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	201.600.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.587.600,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	34.762.800,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.955.200.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.875.200.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.875.200.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	303.660.000,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	303.660.000,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.040.979.691,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.419.000,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	55.419.000,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.758.660,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.758.660,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.754.200,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	99.754.200,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.232.706,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.232.706,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.383.316,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.383.316,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.040,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.040,00
5.1.01.05.07	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.503.680,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.503.680,00
5.1.01.05.08	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00
5.1.01.05.08.0001	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	112.320,00
5.1.01.05.09	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja luran Jaminan Kematian KDH/WKDH	336.960,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	856.205.706,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	255.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	34.000.000,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	170.000,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	3.400.000,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	214.746.613,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	3.651.600,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.190.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	444.860.043,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	80.355.476,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	73.576.974,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	3.271.103,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	3.271.103,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	2.047.600.267,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1.447.600.267,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	1.447.600.267,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	600.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	980.165.000,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	980.165.000,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	980.165.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	406.932.898.756,00
5.1.02.01	Belanja Barang	92.344.482.701,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	84.434.705.467,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	373.315.000,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	42.641.900,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.042.139.300,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	895.963.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	36.000.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	27.900.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	318.185.200,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	93.470.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.895.342.329,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.102.802.120,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	205.000.000,00
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	69.613.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	55.932.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.070.246.430,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	2.163.791.971,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.026.845.732,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	555.506.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.830.326.483,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.054.648.527,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	2.500.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	313.612.800,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.104.167.500,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	277.505.660,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.353.727.260,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.681.490.500,00
5.1.02.01.01.0040	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	150.000.000,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	142.867.350,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	39.265.000,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	119.301.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.738.872.170,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	4.731.025.210,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	5.306.296.025,00
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.304.631.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	50.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	690.000.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	26.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	931.900.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1.208.360.000,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	10.000.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	57.000.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	50.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	142.350.000,00
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	52.200.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	422.800.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	832.455.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	1.708.910.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	127.800.000,00
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	7.909.777.234,00
5.1.02.01.04.0025	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	40.000.000,00
5.1.02.01.04.0038	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	213.200.000,00
5.1.02.01.04.0049	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	30.000.000,00
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	100.000.000,00
5.1.02.01.04.0120	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	180.000.000,00
5.1.02.01.04.0123	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	56.000.000,00
5.1.02.01.04.0132	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	7.500.000,00
5.1.02.01.04.0137	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	10.000.000,00
5.1.02.01.04.0215	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	7.265.077.234,00
5.1.02.01.04.0411	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	158.026.537.701,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	109.990.693.471,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.022.680.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.880.525.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	81.000.000,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	114.000.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	166.200.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	172.400.000,00
5.1.02.02.01.0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	34.040.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	80.460.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.000.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	6.206.600.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	20.993.117.920,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	31.000.000,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	9.000.000,00
5.1.02.02.01.0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	612.682.381,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	79.500.000,00
5.1.02.02.01.0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	79.200.000,00
5.1.02.02.01.0022	Belanja Jasa Tenaga Perhubungan	59.680.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	161.400.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	147.200.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	14.790.315.640,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.169.600.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	10.547.745.855,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	4.224.772.400,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	5.331.476.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	6.002.200.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.207.970.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	788.541.675,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	609.500.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	62.000.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	20.000.000,00
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	568.000.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	44.866.000,00
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	40.000.000,00
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	88.800.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	46.000.000,00
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	508.000.000,00
5.1.02.02.01.0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	143.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	221.396.500,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	673.520.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	21.000.000,00
5.1.02.02.01.0057	Belanja Jasa Operator Kapal	94.250.000,00
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	43.294.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	791.980.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	17.382.360.800,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	398.243.200,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.343.830.100,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	574.150.000,00
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	207.928.000,00
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	1.151.100.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	591.794.000,00
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	6.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	120.874.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	245.000.000,00
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	31.748.933.637,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	31.156.395.237,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	85.584.000,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	106.980.000,00
5.1.02.02.02.0012	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	238.080.000,00
5.1.02.02.02.0013	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	161.894.400,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.981.095.000,00
5.1.02.02.04.0016	Belanja Sewa Kapal Tarik	85.000.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	128.500.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	17.800.000,00
5.1.02.02.04.0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	40.000.000,00
5.1.02.02.04.0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	104.500.000,00
5.1.02.02.04.0052	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	500.000.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	44.295.000,00
5.1.02.02.04.0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	773.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	10.000.000,00
5.1.02.02.04.0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	85.000.000,00
5.1.02.02.04.0317	Belanja Sewa Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi:Kesenian	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0410	Belanja Sewa Peralatan Jaringan	180.000.000,00
5.1.02.02.04.0446	Belanja Sewa Baju Pengaman	1.500.000,00
5.1.02.02.04.0463	Belanja Sewa Alat Peraga Pelatihan	10.000.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	3.447.750.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	20.000.000,00
5.1.02.02.05.0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	154.150.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	599.900.000,00
5.1.02.02.05.0013	Belanja Sewa Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	0,00
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	152.000.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	2.521.700.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	606.300.000,00
5.1.02.02.08.0005	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	106.000.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	16.600.000,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	100.000.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	2.500.000,00
5.1.02.02.08.0014	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Perkotaan	75.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	180.000.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	101.000.000,00
5.1.02.02.08.0021	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air	16.200.000,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	9.000.000,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	582.158.000,00
5.1.02.02.09.0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	225.658.000,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	168.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	188.500.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	8.578.230.536,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.901.285.536,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	191.400.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	2.187.600.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	297.945.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.068.544.721,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	318.240,00
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	42.432.000,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	212.160,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	4.243.200,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	268.003.773,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	4.557.197,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.485.120,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	555.185.333,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	100.283.634,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	91.824.064,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	7.832.336,00
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	4.082.336,00
5.1.02.02.14.0019	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	3.750.000,00
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	15.000.000,00
5.1.02.02.15.0009	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	15.000.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	10.093.033.525,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.362.179.400,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	515.518.500,00
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	685.500.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	21.730.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	30.000.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	75.450.000,00
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	29.850.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.498.448.600,00
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	100.000.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	172.366.000,00
5.1.02.03.02.0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	7.000.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	65.000.000,00
5.1.02.03.02.0322	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga PAUD/TK	2.012.300,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	21.000.000,00
5.1.02.03.02.0406	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	49.940.000,00
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	63.364.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	5.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.525.251.125,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.191.503.180,00
5.1.02.03.03.0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	51.600.000,00
5.1.02.03.03.0003	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Bengkel/Hanggar	200.000.000,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	196.220.245,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	371.977.700,00
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	460.200.000,00
5.1.02.03.03.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Stasiun Bus	5.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	48.750.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.205.603.000,00
5.1.02.03.04.0021	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	1.511.310.000,00
5.1.02.03.04.0035	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengairan Pasang Surut-Saluran Pembuang Pasang Surut	414.000.000,00
5.1.02.03.04.0073	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pelengkap Air Kotor	160.000.000,00
5.1.02.03.04.0126	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	120.293.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	44.394.827.489,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	44.054.827.489,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	25.056.682.290,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	18.491.541.199,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	506.604.000,00
5.1.02.04.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	340.000.000,00
5.1.02.04.02.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri	340.000.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.632.189.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7.632.189.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	676.189.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	6.956.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	32.908.324.040,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	32.908.324.040,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	32.908.324.040,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	717.924.500,00
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	717.924.500,00
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	717.924.500,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	60.815.579.800,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	60.815.579.800,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	60.815.579.800,00
5.1.03	Belanja Bunga	320.000.000,00
5.1.03.03	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	320.000.000,00
5.1.03.03.05	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	320.000.000,00
5.1.03.03.05.0001	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	320.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	61.809.995.501,00
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	29.915.000.000,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	26.950.000.000,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	26.950.000.000,00
5.1.05.01.02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.965.000.000,00
5.1.05.01.02.0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	2.965.000.000,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	27.493.855.501,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.842.800.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	6.842.800.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	17.824.613.001,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	8.487.500.000,00
5.1.05.05.02.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	9.337.113.001,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.775.480.000,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.125.000.000,00
5.1.05.05.03.0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	1.650.480.000,00
5.1.05.05.04	Belanja Hibah kepada Koperasi	50.962.500,00
5.1.05.05.04.0002	Belanja Hibah Barang kepada Koperasi	50.962.500,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	3.496.700.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.496.700.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	3.496.700.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	904.440.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	904.440.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	904.440.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.146.097.200,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.016.097.200,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	1.791.097.200,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	1.791.097.200,00
5.1.06.01.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	225.000.000,00
5.1.06.01.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu	225.000.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	130.000.000,00
5.1.06.02.02	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	130.000.000,00
5.1.06.02.02.0001	Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga	130.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	214.355.842.944,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	448.850.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	448.850.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	423.850.000,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	423.850.000,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	25.000.000,00
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	25.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	49.782.908.494,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	4.353.615.284,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	1.458.950.000,00
5.2.02.01.01.0012	Belanja Modal Alat Besar Darat Lainnya	1.458.950.000,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	2.894.665.284,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	1.627.665.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	25.000.000,00
5.2.02.01.03.0016	Belanja Modal Alat Bantu Lainnya	1.242.000.284,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	11.422.992.903,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	11.107.992.903,00
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	8.887.000.000,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.220.992.903,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	1.000.000.000,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	15.000.000,00
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	15.000.000,00
5.2.02.02.03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	300.000.000,00
5.2.02.02.03.0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	300.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	36.909.998,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	28.909.998,00
5.2.02.03.01.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Khusus	28.909.998,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	8.000.000,00
5.2.02.03.03.0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	8.000.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	21.050.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	21.050.000,00
5.2.02.04.01.0006	Belanja Modal Alat Processing	21.050.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	8.240.877.916,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	721.640.000,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	721.640.000,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	6.079.125.216,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.724.370.000,00
5.2.02.05.02.0003	Belanja Modal Alat Pembersih	29.343.500,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	1.459.821.916,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	235.137.500,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.528.756.300,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	101.696.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.440.112.700,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	388.859.800,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	344.157.200,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	203.797.600,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	503.298.100,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.351.812.030,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	4.273.941.830,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	2.340.580.030,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.01.0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	295.611.800,00
5.2.02.06.01.0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	1.637.750.000,00
5.2.02.06.02	Belanja Modal Alat Komunikasi	77.870.200,00
5.2.02.06.02.0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	76.870.200,00
5.2.02.06.02.0011	Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	1.000.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.981.839.603,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	3.981.839.603,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	3.981.839.603,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	110.000.000,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	10.000.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	10.000.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	100.000.000,00
5.2.02.08.03.0009	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi:Keterampilan	100.000.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	6.892.762.500,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	4.067.824.400,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	3.292.894.400,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	774.930.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	2.824.938.100,00
5.2.02.10.02.0002	Belanja Modal Peralatan Mini Computer	5.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	2.819.938.100,00
5.2.02.16	Belanja Modal Alat Peraga	20.470.000,00
5.2.02.16.01	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	20.470.000,00
5.2.02.16.01.0003	Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya	20.470.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	292.550.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	292.550.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	292.550.000,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.653.773.060,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.653.773.060,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	6.653.773.060,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.404.255.200,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.404.255.200,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	3.404.255.200,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	100.790.344.050,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	92.404.943.450,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	89.145.488.850,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	5.921.224.300,00
5.2.03.01.01.0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	37.819.300.250,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	25.005.896.000,00
5.2.03.01.01.0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	2.850.000.000,00
5.2.03.01.01.0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	2.117.600.000,00
5.2.03.01.01.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung untuk Pos Jaga	20.000.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	100.000.000,00
5.2.03.01.01.0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	10.354.250.000,00
5.2.03.01.01.0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	250.000.000,00
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	50.000.000,00
5.2.03.01.01.0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	2.557.823.300,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	1.194.900.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	904.495.000,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	3.259.454.600,00
5.2.03.01.02.0002	Belanja Modal Rumah Negara Golongan II	160.440.000,00
5.2.03.01.02.0005	Belanja Modal Asrama	2.299.014.600,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	800.000.000,00
5.2.03.02	Belanja Modal Monumen	33.300.000,00
5.2.03.02.01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	33.300.000,00
5.2.03.02.01.0002	Belanja Modal Tugu	33.300.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	6.052.100.600,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	6.052.100.600,00
5.2.03.04.01.0003	Belanja Modal Pilar/Tugu/Tanda Lainnya	2.427.920.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	3.624.180.600,00
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.300.000.000,00
5.2.03.99.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.300.000.000,00
5.2.03.99.99.9999	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	2.300.000.000,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	53.385.401.500,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	36.416.273.800,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	34.938.423.800,00
5.2.04.01.01.0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	28.910.595.000,00
5.2.04.01.01.0010	Belanja Modal Jalan Lainnya	6.027.828.800,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	1.477.850.000,00
5.2.04.01.02.0003	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	931.540.000,00
5.2.04.01.02.0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	396.310.000,00
5.2.04.01.02.0013	Belanja Modal Jembatan Lainnya	150.000.000,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	4.953.797.700,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	717.521.800,00
5.2.04.02.01.0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	191.940.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	525.581.800,00
5.2.04.02.04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	833.440.000,00
5.2.04.02.04.0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	50.000.000,00
5.2.04.02.04.0007	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya	783.440.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	3.402.835.900,00
5.2.04.02.07.0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	361.000.000,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	3.041.835.900,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	8.971.380.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.215.980.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.215.980.000,00
5.2.04.03.02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	5.110.400.000,00
5.2.04.03.02.0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	5.110.400.000,00
5.2.04.03.03	Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	80.000.000,00
5.2.04.03.03.0003	Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah	80.000.000,00
5.2.04.03.05	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	2.565.000.000,00
5.2.04.03.05.0009	Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)	2.565.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	3.043.950.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	3.043.950.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	3.043.950.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.805.032.900,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	280.000.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	262.500.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	262.500.000,00
5.2.05.01.02	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Terekam dan Bentuk Mikro	17.500.000,00
5.2.05.01.02.0001	Belanja Modal Audio Visual	17.500.000,00
5.2.05.02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	603.030.000,00
5.2.05.02.01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	20.280.000,00
5.2.05.02.01.0001	Belanja Modal Alat Musik	20.280.000,00
5.2.05.02.03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	582.750.000,00
5.2.05.02.03.0002	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Lainnya	582.750.000,00
5.2.05.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.922.002.900,00
5.2.05.88.88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.922.002.900,00
5.2.05.88.88.8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	7.922.002.900,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	1.143.306.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	1.143.306.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.143.306.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	1.143.306.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00
5.2.06.99.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00
5.2.06.99.99.9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	0,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	149.377.100.376,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	5.764.434.276,00
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	5.141.387.696,00
5.4.01.01.03	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.141.387.696,00
5.4.01.01.03.0001	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	5.141.387.696,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	623.046.580,00
5.4.01.02.01	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	623.046.580,00
5.4.01.02.01.0001	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	623.046.580,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	143.612.666.100,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	143.612.666.100,00
5.4.02.05.02	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	143.612.666.100,00
5.4.02.05.02.0004	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa	64.498.758.000,00
5.4.02.05.02.0005	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa	79.113.908.100,00
	Jumlah Belanja	1.514.100.155.093,00
	Total Surplus/(Defisit)	3.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.000.000.000,00
6.1.01.07	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00
6.1.01.07.01	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	5.000.000.000,00
6.1.01.07.01.0001	Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja	5.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	8.000.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.000.000.000,00
6.2.03.03	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	8.000.000.000,00
6.2.03.03.02	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	8.000.000.000,00
6.2.03.03.02.0001	Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMN-Jangka Menengah	8.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	8.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	-3.000.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Pangkajene Kepulauan, 29 Desember 2023

Bupati

H. MUHAMMAD YUSRAN LALOGAU, S. Pi, M. Si